



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## Wakil Rakyat Di Pusaran Korupsi Perjalanan Dinas

**BINTUHAN** - Oknum wakil rakyat atau anggota DPRD Kaur periode 2019-2024 berada di pusaran korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kaur tahun 2023.

Saat ini dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas tahun 2023 di Kabupaten Kaur sudah masuk ke tahapan penyidikan.

Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, melalui Kasi Pidsus Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH mengatakan, sekarang mereka terus mengebut hasil penghitungan ulang kerugian negara dari perbuatan melawan hukum. Sehingga setelah penghitungan kerugian negara nanti, kemungkinan besar tim penyidik bakal menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Sekarang masih penghitungan kerugian negara ulang, kemungkinan setelah ini bakal ada penetapan tersangka," kata Bobbi.

Dijelaskan Bobbi, tim penyidik sekarang juga tengah menyiapkan berkas untuk pemanggilan seluruh anggota

"Sekarang kita juga mempersiapkan berkas untuk pemanggilan para anggota DPRD Kaur, hanya tinggal mereka lagi yang belum kita panggil," terang Bobbi.

Bahkan tim penyidik Kejari Kaur telah menemukan beberapa temuan dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara dalam perjalanan dinas. Dugaan perbuatan melawan hukum pertama ada pada pencatatan 37 nama tenaga honorer dengan kerugian negara Rp1,6 miliar.

Kemudian ada pada perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Setwan Kaur dengan total kerugian negara Rp 4,6 miliar. Jumlah kerugian negara itu tentunya cukup besar, bahkan ini pecah telor dugaan kasus tindak pidana korupsi di Setwan Kaur karena sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti ini hanya ada temuan TGR tapi diupayakan untuk pengembalian.

Tim penyidik Kejari Kaur, sekarang juga telah mengantongi nama-nama yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut. Akan tetapi, masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memasti-

kan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa di ditangkap. Kemungkinan besar setelah penghitungan ulang KN, Kejari Kaur akan segera melakukan penetapan tersangka yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM menanggapi kasus ini mengatakan Pemkab Kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Setwan Kaur. Apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.

Sebagai informasi, Jumat, 24 Januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan pengeledahan di Setwan Kaur sebanyak 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan. (cil)